

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap protein hewani, sektor perikanan Indonesia kini dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan di perairan laut maupun perairan tawar.. Penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*), penggunaan alat tangkap yang merusak, serta tekanan lingkungan menyebabkan banyak spesies ikan mengalami penurunan populasi yang signifikan.(Briggs, 2003)

Menurut laporan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pada tahun 2007, konsumsi ikan di Indonesia menyumbang hingga 67% dari total kebutuhan protein hewani per kapita. Angka ini menunjukkan pentingnya sektor perikanan dalam menunjang gizi dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, data FAO (2009) mengungkapkan bahwa dari 523 spesies ikan yang dipantau, sebanyak 52% telah berada pada status *fully exploited* dan 17% tergolong *overexploited*. Temuan ini memunculkan kekhawatiran akan kelangsungan populasi ikan di alam serta ancaman terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkap. Eksploitasi sumber daya laut yang tidak terkendali tidak hanya mengancam keberlanjutan populasi ikan, tetapi juga menurunkan kualitas ikan yang beredar di pasaran. Selain itu, *overfishing* memberikan tekanan berat pada keseimbangan ekosistem laut, yang pada akhirnya memengaruhi mutu hasil tangkapan.

Kondisi inilah yang mendorong pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sektor perikanan budidaya (akuakultur) sebagai strategi jangka panjang. Akuakultur dipandang sebagai solusi alternatif untuk menjaga pasokan ikan secara berkelanjutan, mengurangi tekanan terhadap ekosistem

laut, serta membuka peluang ekonomi baru melalui sistem produksi yang lebih terkendali dan dapat diperluas di berbagai wilayah, baik pesisir maupun perdesaan.

Memasuki dekade berikutnya, pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia semakin fokus mendorong pertumbuhan sektor budidaya perikanan, khususnya komoditas bernilai tinggi. Menurut Purwaningsih et al (2014), ikan kerapu, kakap, dan rumput laut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk menggantikan sebagian ketergantungan pada ikan tangkap, sekaligus menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir. Pendekatan budidaya komoditas tersebut tidak hanya memenuhi permintaan pasar domestik, tetapi juga menembus pasar ekspor yang lebih menggiurkan. Dengan teknologi budidaya yang semakin terjangkau dan dukungan dari berbagai lembaga, seperti bantuan bibit unggul dan pelatihan teknis, banyak kelompok nelayan di wilayah pesisir mulai beralih ke model usaha budidaya ini. Akibatnya, sektor budidaya terus menjadi primadona bagi strategi pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa-pesisir.

Pertumbuhan produksi budidaya nasional berlangsung sangat pesat. Berdasarkan data KKP (2022), volume produksi akuakultur di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 14,65 juta ton, menyentuh titik tertinggi yang melampaui angka produksi ikan tangkap sebesar 7,22 juta ton. Lonjakan ini merefleksikan keberhasilan program-program pemerintah yang menyediakan insentif bagi petambak, memperluas subsidi pakan, serta meningkatkan akses pembiayaan mikro. Selain itu, maraknya adopsi teknologi pembenihan terintegrasi dan sistem sirkulasi air tertutup telah mendorong efisiensi produksi. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih beragam mulai dari budidaya benih, pakan, hingga pengolahan hasil budidaya yang secara langsung mengurangi tekanan pencarian ikan di alam dan memperbaiki kestabilan ekosistem laut dan perairan darat.

Kontribusi sektor perikanan, terutama budidaya, terhadap perekonomian nasional juga menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2022, nilai kontribusi subsektor ini tercatat mencapai USD 32,11 miliar, atau sekitar 2,6% dari total PDB Indonesia (KKP, 2022). Angka ini mencerminkan tidak hanya nilai produksi fisik, tetapi juga multiplier effect yang dihasilkan dari rantai pasok budidaya—mulai

penyediaan pakan, jasa teknis, hingga perdagangan dan distribusi. Lebih dari 3,76 juta rumah tangga di Indonesia secara langsung menggantungkan mata pencaharian pada subsektor perikanan, baik sebagai petani maupun sebagai pekerja di industri pengolahan. Dengan demikian, peningkatan produksi budidaya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan output bruto, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah pesisir dan pedesaan.

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan (ton) di Kota Padang, Tahun 2021-2024

Tahun	Produksi Perikanan (ton)
2021	2.119,75
2022	2.121,25
2023	2.889,54
2024	1.735

Sumber :BPS Padang, 2021-2024

Berdasarkan Tabel 1.1 menjelaskan data mengenai jumlah produksi perikanan (dalam ton) serta jumlah rumah tangga perikanan di Kota Padang selama periode tahun 2021 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa produksi perikanan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, total produksi perikanan tercatat sebesar 2.119,75 ton dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 2.121,25 ton di tahun 2022, yang mencerminkan pertumbuhan yang relatif stabil. Peningkatan yang mencolok terjadi pada tahun 2023, di mana produksi melonjak menjadi 2.889,54 ton. Lonjakan ini kemungkinan besar didorong oleh implementasi program pengembangan budidaya perikanan yang lebih terstruktur, termasuk bantuan sarana produksi dan pelatihan kepada kelompok pembudidaya. Namun, pada tahun 2024, produksi menurun tajam menjadi hanya 1.735 ton, menunjukkan penurunan lebih dari 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam sektor perikanan, seperti cuaca ekstrem, penurunan kualitas lingkungan perairan, keterbatasan sarana produksi, atau kurangnya keberlanjutan program dukungan.

Di Kota Padang sendiri, dukungan Pemerintah Daerah semakin terlihat sejak 2021–2022 melalui program “Kampung Tematik.” Salah satunya adalah menetapkan Pokdakan Sarasah di Bungus Timur sebagai Kampung Tematik Ikan Hias. Model ini memfokuskan pada budidaya ikan mas koki dengan memanfaatkan terpal bekas, tenaga kerja lokal yang merupakan rumah tangga perikanan, dan infrastruktur pendukung yang diperkuat oleh CSR dan Bappeda. Keberadaan Pokdakan Sarasah dianggap mewakili upaya bottom-up dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, di mana hampir 100% input produksi (terpal, batang pinang, pakan tradisional, tenaga kerja) bersumber dari dalam komunitas. Oleh karena itu, studi tentang *multiplier effect* di Pokdakan Sarasah akan memperlihatkan seberapa jauh nilai ekonominya “berlipat” di tingkat lokal (MC Padang, 2022).

Sebagai pembanding, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki program budidaya laut yang cukup menonjol, salah satunya adalah Keramba Jaring Apung (KJA) Batu Kabau yang berlokasi di Kampung Sungai Bungin, Kecamatan Batang Kapas. Program ini merupakan bagian dari inisiatif pengembangan perikanan budidaya yang didukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Dukungan tersebut berupa bantuan 1 unit KJA dan 700 ekor benih lobster mutiara, yang diberikan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Batu Kabau untuk mengembangkan budidaya lobster di wilayah perairan laut dangkal yang dinilai potensial .

Pemilihan Keramba Jaring Apung (KJA) Batu Kabau di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pembanding dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis dan kontekstual. Pertama, lokasi ini merupakan salah satu sentra budidaya laut potensial di Sumatera Barat, yang telah mendapatkan intervensi langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Pada tahun 2024, KJA Batu Kabau menerima bantuan berupa 700 ekor benih lobster dan satu unit keramba dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar sebagai bagian dari program pengembangan budidaya komoditas ekspor seperti lobster dan ikan kerapu (Padangterkininews, 2024). Bantuan ini menegaskan bahwa wilayah ini menjadi prioritas dalam pengembangan akuakultur laut yang bernilai ekonomi tinggi.

Selain lobster, KJA ini juga dimanfaatkan untuk budidaya ikan kerapu, yang merupakan salah satu komoditas laut unggulan bernilai tinggi. Budidaya ikan laut dalam KJA memiliki prospek pendapatan yang signifikan karena harga jual lobster dan kerapu di pasar ekspor dapat mencapai hingga Rp1,4–1,5 juta per kilogram, khususnya untuk jenis lobster mutiara dan kerapu cantang (BiNews, 2025; Vinolia, 2023). Potensi ini menjadikan KJA sebagai sumber pendapatan alternatif yang menjanjikan bagi masyarakat pesisir.

Meskipun literatur tentang efek pengganda (*multiplier effect*) pada sektor perikanan dan akuakultur semakin berkembang, sebagian besar studi di Indonesia masih bersifat makro atau menggunakan tabel input-output tingkat nasional yang teragregasi sehingga kurang mampu menangkap dinamika aliran nilai di tingkat komunitas atau desa pesisir. Penelitian-penelitian regional yang berbasis survei menunjukkan bahwa multiplier daerah sangat dipengaruhi oleh struktur konsumsi lokal dan sumber input (lokal vs eksternal), namun bukti empiris yang membandingkan dua model usaha akuakultur dengan karakteristik input yang berbeda (komunitas-based vs kapital-intensif/bergantung input eksternal) masih terbatas, terutama di konteks Sumatera Barat. Dengan demikian diperlukan studi komparatif yang mengukur langsung ME, IM1, dan IM2 di tingkat kelompok pembudidaya untuk memahami bagaimana penggunaan input lokal, keterlibatan komunitas, dan kebocoran ekonomi (*“leakage”*) mempengaruhi magnitudo dan distribusi manfaat ekonomi—sebuah celah yang diisi oleh penelitian ini (Hoshino et al, 2024) .

Rangkaian temuan riset terdahulu di berbagai daerah menguatkan fokus pada Pokdakan Sarasah dan KJA Batu Kabau sebagai studi kasus. (Pamungkas, 2019) mencatat bahwa budidaya ikan lele di Ponorogo dengan input lokal menghasilkan multiplier hingga 8,86. (Gitawati, 2018) menegaskan bahwa setiap Rp 1 juta peningkatan produksi budidaya secara umum dapat menambah Rp 650.000 PDB sektor perikanan. (Doanta et al., 2022) menemukan multiplier tenaga kerja sebesar 2,75 pada usaha budidaya yang sepenuhnya menggunakan buruh lokal. Di sisi lain, (Thorpe et al., 2005) memperingatkan bahwa model perikanan bergantung input eksternal cenderung mengalirkan nilai tambah ke luar wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai besarnya *multiplier effect* yang dihasilkan oleh kegiatan budidaya ikan hias di Pokdakan Sarasah, yang berlokasi di Bungus Timur, Kota Padang. Fokus utama terletak pada analisis bagaimana struktur pengeluaran yang mayoritas bersumber dari dalam komunitas, serta tingginya keterlibatan masyarakat lokal, dapat menghasilkan dampak ekonomi berlapis yang signifikan. Penelitian ini juga akan membandingkan fenomena tersebut dengan kondisi di Keramba Jaring Apung (KJA) Batu Kabau di Kabupaten Pesisir Selatan, yang mengandalkan banyak input eksternal seperti bibit dan pakan pabrikan, sehingga memberikan gambaran berbeda terkait distribusi manfaat ekonominya. Melalui perbandingan ini, studi ini diharapkan mampu merumuskan implikasi kebijakan strategis dalam pengembangan sektor akuakultur di wilayah pesisir Sumatera Barat, khususnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal serta kontribusinya terhadap upaya pengentasan kemiskinan di daerah pesisir.

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari kondisi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi fokus pembahasan kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengembangan akuakultur di pokdakan Sarasah dan Keramba Jaring Apung Batu Kabau dapat memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian masyarakat lokal ?
2. Bagaimana Perbandingan dampak pengganda di Pokdakan Sarasah dengan Keramba Jaring Apung Batu Kabau ?
3. Bagaimana Implikasi kebijakan yang dilakukan terhadap hasil *multiplier effect* di Pokdakan Sarasah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Kajian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Menganalisis dampak pengganda yang ditimbulkan dari pengembangan

- akuakultur di Pokdakan Sarasah terhadap perekonomian masyarakat lokal
2. Menganalisis perbandingan dampak pengganda di Pokdakan Sarasah dengan Keramba Jaring Apung Batu Kabau.
 3. Menganalisis implikasi kebijakan yang dilakukan terhadap hasil Multiplier effect di Pokdakan Sarasah.

1.4 Manfaat Penelitian

Lebih lanjut, hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Akademis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai analisis *multiplier effect* pada sektor akuakultur, khususnya dalam konteks pengembangan usaha berbasis komunitas dan usaha budidaya skala keramba. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam melakukan kajian serupa di bidang ekonomi perikanan, pembangunan daerah, maupun studi keberlanjutan.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat pelaku usaha, terutama anggota Pokdakan Sarasah dan KJA Batu Kabau, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas budidaya. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi keluarga dan komunitas lokal dalam pengelolaan usaha serta memperluas manfaat sosial-ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

3. Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman berharga dalam mengaplikasikan konsep teori ekonomi, khususnya teori *multiplier effect* Keynesian, ke dalam konteks nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini memperluas wawasan penulis mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam sektor akuakultur, yang dapat menjadi bekal untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis dampak ekonomi kegiatan budidaya perikanan terhadap masyarakat lokal melalui pendekatan *multiplier effect*. Studi difokuskan pada dua lokasi berbeda di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Pokdakan Sarasah yang berlokasi di Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, serta Keramba Jaring Apung (KJA) Batu Kabau yang berada di Kampung Sungai Bungin, Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkup analisis mencakup tiga jenis dampak ekonomi, yaitu:

1. Dampak langsung, yang meliputi aktivitas ekonomi dari produksi utama budidaya, seperti biaya pembelian bibit, pakan, tenaga kerja, dan peralatan.
2. Dampak tidak langsung, yang mencakup kegiatan ekonomi yang timbul akibat aktivitas pokok budidaya, seperti perbaikan infrastruktur, distribusi input produksi, dan jasa logistik lokal.
3. Dampak lanjutan (*induced effect*), yaitu perubahan pengeluaran rumah tangga masyarakat akibat meningkatnya pendapatan dari aktivitas budidaya, termasuk belanja konsumsi, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

